

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A Gumilang, 1993, *Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung.
- Abdul Jamil, 1989, *Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.7 tahun 1989, dalam Jurnal Hukum dan Keadilan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol.I.
- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian tindak pidana Korupsi*, Refikasi A Ditama, Bandung.
- Ahmad Ali, 2012, *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alexander Beveridge, *Forensic Investigation of Explosions*, Second Edition, CRC Press
- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis, 2014, *Hukum acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Anthon F. Susanto , 2004, *Wajah Peradilan Kita : Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, Indonesia.
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta.
- Casarett and Doull's Toxicology, *The basic Sceince of Poisons*, Sixth Edition, Editor Curtis D. Klaassen. Ph.D United States of America. McGraw-Hill
- Charles L Mader, 2007, Numerical Modeling of Explosives and Propellants, [CRC Press](#)
- Clarke' *Analysis of Drugs and Poisons*, Third edition , Edited by Anthony C
- Darwan Print, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta
- Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan).
- Eckert, W.G. 1997, *Introduction to forensic sciences* (2nd Ed). Boston : CRC Press.

- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, 1988, *Analisa Kimia Kuantitatif*, edisi ke Empat, Editor penterjemah Drs. R Soendoro, Penerbit Erlangga
- Frank C. Barnes, *Cartridges of The World*, 11th Edition, By Edition Stan Skinner Gunshot Wounds, *Practical Aspects of Firearms, Ballistics and Forensic Techniques*, Second Edition, Vincent J.M. Di Maio
- G.W Bawengan, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Introgasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek*, Maju Mundur, Bandung.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Heru Kustriyadi Wibawa, 2002, *Verifikasi Dokumen dan Tanda Tangan, Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Perbankan dan Keuangan*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta
- Lily Rasyidi, I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Loebby Loqman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom.
- Marjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum melawan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI.
- , 1997, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu pemikiran awal) dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- , 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. ke-2, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Cetakan I, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peter Rhys Lewis, Ken Reynolds, Colin Gagg, *Forensic Materials Engineering Case Studies*, CRC Press.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- , 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang –Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sacipto Rahardjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I, Laksbang PresIndo, Yogyakarta.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press..
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Cet.1.*, UMM Press, Malang.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda Cet.1*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Zainuddin Ali, 2015, *Hukum Islam, Vol. XV*, sinar grafika, Jakarta.
- Zulkarnaen Koto, 2011, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

TAP MPR:

TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Instruksi Presiden:

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI

Keputusan:

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1173 / Menkes / SK / X /1998 tentang Penunjukan Laboratorium pemeriksa Narkoba dan Psikotropika

Peraturan Kapolri:

Peraturan KAPOLRI nomor 21 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satker Mabes Polri.

Peraturan KAPOLRI No 10 tahun 2009 tentang tata cara permintaan bantuan kepada Labfor Polri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Lain-lain :**Surat :**

Surat Edaran Jaksa Agung RI No. 5 / KRI / 2589 perihal penunjukan Labkrim Polri untuk pemeriksa tulisan.

Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 808 / XII /1983 perihal penunjukan Labkrim Polri sebagai pemeriksa barang bukti kasus pidana umum.

Surat edaran Jaksa Agung RI No. SE / 003/SA/2/1984 tentang keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti

Modul:

Pusat Laboratorium Forensik Polri, *Kriminalistik/Laboratorium Forensik*, Modul Materi Bahan pengajaran AKPOL 2016.

Jurnal:

- Tias, Fauziah Wahyuning. 2012. Perlukah Mahasiswa Strata Satu Akuntansi di Indonesia Memiliki Persepsi Audit Forensik? (online) Jurnal Akunesa. Vol.2, No.2 <http://ejournal.unesa.ac.id/article/549/57/article.pdf> (diakses 21 April 2013)
- Badjuri, Achmad. 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia. (online) Jurnal Bisnis dan Ekonomi 19 (JBE), Volume 18, Nomor 1, Maret 2011. ISSN : 1412-3126. <http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/532/383> (diakses 15 Mei 2013).
- Tarsito. R. Brookler. 1992. "Industry Standards in Workplace Drug Testing" dalam Personnel Journal. <http://www.drug-testing-solutions.net/statinabdrug.html> [10 Juni 2010 pukul 10.30 WIB].
- Gusnardi. 2012. Peran Forensic Accounting dalam Pencegahan Fraud. (online) Pekbis Jurnal. Vol.4, No.1. <http://eprints.uny.ac.id/8748/4/bab%205%20-08412141007.pdf> (diakses 22 April 2013)